

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa Tengah.

Susi Astuti

susieastuti@gmail.com

Mispiyanti

mispiyanti@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kualitas pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diikuti dengan berkurangnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini untuk membuktikan secara empiris bahwa pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana menggunakan program SPSS. Data diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menguji secara ilmiah tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan kemandirian, efisiensi efektivitas, belanja operasi, belanja modal, pertumbuhan, dan ketergantungan tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan derajat desentralisasi berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia. Kemandirian, efisiensi, efektivitas, pertumbuhan ketergantungan, dan derajat desentralisasi tidak berpengaruh pada Kemiskinan. Sedangkan belanja operasi dan belanja modal berpengaruh pada Kemiskinan. Kemandirian, efektivitas, belanja modal, pertumbuhan, ketergantungan, dan derajat desentralisasi tidak berpengaruh pada Pengangguran. Sedangkan efisiensi dan belanja operasi berpengaruh pada Pengangguran. Kemandirian, efisiensi, efektivitas, belanja operasi, belanja modal, pertumbuhan, ketergantungan, dan derajat desentralisasi tidak berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi.

Kata kunci: kinerja keuangan; pertumbuhan ekonomi; pengangguran; kemiskinan; Indeks Pembangunan Manusia

LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi. Struktur pemerintahan yang baik diharapkan mampu melindungi dan

melayani kebutuhan masyarakat. Indikator kesuksesan pada pemerintahan tidak hanya melihat dari keberhasilan dalam keuangan saja, tetapi mutu pelayanan dan efisiensi dari penggunaan dana yang tersedia.

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja. Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut akan tercapai jika setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan, dan berketerampilan serta mempunyai pendapatan.

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pembangunan manusia dikatakan berhasil apabila permasalahan yang muncul dan bersifat mendasar dapat diatasi, diantaranya adalah masalah kemiskinan, buta huruf, dan ketahanan pangan¹.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan

sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Dengan perekonomian yang terus tumbuh, maka kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, perbaikan gizi, dan kesehatan termasuk pendidikan akan semakin baik².

Dalam sumbangsihnya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), Pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar jika dibandingkan dengan pulau lainnya dengan perincian provinsi yang memberikan sumbangan terbesar adalah DKI Jakarta sebesar 17,81%, Jawa Timur sebesar 15,41%, Jawa Barat sebesar 14,49%, dan Jawa Tengah sebesar 8,42%. Provinsi Jawa Tengah memiliki kontribusi terhadap PDB nasional yang masih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa³.

Terdapat 15 kabupaten di Jawa Tengah masuk dalam zona merah kemiskinan, yaitu Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Klaten, Sragen, Cilacap, Demak, Purworejo, Grobogan, dan Demak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pada bulan Maret 2014 angka kemiskinan di Jawa Tengah

sebesar 4,83 juta jiwa. Pada bulan September 2014, angka kemiskinan turun menjadi 13,58% atau menjadi 4,56 juta jiwa. Pada bulan Maret 2015, persentase kemiskinan tetap di angka 13,58%. Namun, angka tersebut kembali menurun pada bulan September 2015 menjadi 13,33% atau sebesar 4,5 juta jiwa. Persentase kemiskinan juga menurun pada bulan Maret 2016 menjadi 13,27%. Angka kemiskinan menurun lagi pada bulan September 2016 menjadi 13,19% atau menjadi 4,49 juta jiwa⁴.

Terdapat 1,7 juta pengangguran di Jawa Tengah dengan rentang usia 16-30 tahun dalam kondisi menganggur dan sedang menunggu kepastian kerja⁵. Tingginya angka pengangguran di Provinsi Jawa Tengah disebabkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas serta minimnya bantuan akses pembiayaan untuk modal usaha⁶.

Berdasarkan fenomena, peneliti tertarik untuk menguji lebih dalam dan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia dengan studi

kasus kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yaitu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya⁷.

Keuangan daerah mempunyai makna sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan pelayanan masyarakat dalam suatu

daerah. Oleh karena itu, keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja yang komprehensif. Penilaian laporan kinerja keuangan diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai peningkatan kegiatan ekonomi pada suatu daerah yang akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan

kemandirian daerah. Pertumbuhan ini akan terjadi apabila seluruh pemangku kepentingan (pemerintah) di daerah bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi seperti meningkatnya investasi⁸.

Selain itu, pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal, menyediakan perumahan dengan biaya rendah, melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian.

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Pengangguran dibedakan atas tiga jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, yaitu:

a. Pengangguran friksional, yaitu

pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.

- b. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
- c. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Bentuk-bentuk pengangguran adalah:

- a. Pengangguran terbuka (*open unemployment*), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka.
- b. Setengah pengangguran (*under unemployment*), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan.
- c. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*) adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena

kurang gizi atau penyakit.

- d. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik⁹

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam, sehingga kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber- sumber keuangan, dan informasi.

Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Aspek lain dari kemiskinan ini adalah

bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non-makanan atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Standar kemiskinan dapat dilihat juga berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional.

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelegktualitas dan standar hidup layak. Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Standar Hidup Layak.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kinerja Keuangan berpengaruh positif

terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H2 : Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Pengangguran

H3 : Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Kemiskinan

H4 : Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

METODE

Variabel Penelitian

- a. Variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia
- b. Variabel independen, yaitu kinerja keuangan

Definisi Operasional Variabel

- a. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan kemandirian daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, 2016, dan 2017.
- b. Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja tahun 2015, 2016, dan 2017

- c. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (*basic needs*). Penduduk miskin adalah penduduk Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan tahun 2015, 2016, dan 2017

- d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang memperlihatkan kualitas penduduk wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah tentang harapan hidup, intelegktualitas dan standar hidup layak tahun 2015, 2016, dan 2017

e. Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, 2016, dan 2017

Populasi dan sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah

Model Penelitian

Model penelitian untuk menguji hubungan kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial maupun secara simultan¹⁰.

Model persamaan regresi:

$$Y_1 = a + b.X + e$$

$$Y_2 = a + b.X + e$$

$$Y_3 = a + b.X + e$$

$$Y_4 = a + b.X + e$$

Dimana:

X = Kinerja Keuangan

a = konstanta

Y₁ = Pertumbuhan ekonomi

Y₂ = Pengangguran

Y₃ = Kemiskinan

Y₄ = Indeks Pembangunan

Manusia

e = Faktor pengganggu di luar model (kesalahan regresi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indeks Pembangunan Manusia (Y1)

Variabel kemandirian (X2) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel kemandirian 0,742 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel efisiensi (X3) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel efisiensi 0,916 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel efektivitas (X4) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis

ditolak, karena nilai Sig. Variabel efektifitas 0,337 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel belanja operasi (X5) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel belanja operasi 0,443 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05.

Variabel belanja modal (X6) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel belanja modal 0,787 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel Pertumbuhan (X7) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel Pertumbuhan 0,595 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel ketergantungan (X8) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel

ketergantungan 0,354 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Sedangkan variabel derajat desentralisasi (X9) mempunyai pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis diterima, karena nilai Sig. Variabel derajat desentralisasi 0,000 < probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana hasil sama dengan kriteria berpengaruh yaitu sig. kurang dari probabilitas 0,05.

2. Kemiskinan (Y2)

Variabel kemandirian (X2) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel kemandirian 0,605 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel efisiensi (X3) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel efisiensi 0,285 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel efektifitas (X4) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel efektifitas 0,533 > probabilitas $\alpha = 5\%$

(0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Sedangkan variabel belanja operasi (X5) berpengaruh terhadap Kemiskinan maka hipotesis diterima, karena nilai Sig. Variabel belanja operasi 0,008 < probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana hasil sama dengan kriteria berpengaruh yaitu sig. kurang dari probabilitas 0,05.

Variabel belanja modal (X6) berpengaruh terhadap Kemiskinan maka hipotesis diterima, karena nilai Sig. Variabel belanja operasi 0,007 < probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana hasil sama dengan kriteria berpengaruh yaitu sig. kurang dari probabilitas 0,05. Sedangkan variabel Pertumbuhan (X7) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel Pertumbuhan 0,393 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel ketergantungan (X8) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel ketergantungan 0,206 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel derajat desentralisasi (X9) tidak

berpengaruh terhadap Kemiskinan maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel derajat desentralisasi 0,087 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05.

3. Pengangguran (Y3)

Variabel kemandirian (X2) tidak berpengaruh terhadap Pengangguran maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel kemandirian 0,932 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Sedangkan variabel efisiensi (X3) berpengaruh terhadap Pengangguran maka hipotesis diterima, karena nilai Sig. Variabel efisiensi 0,032 < probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana hasil sama dengan kriteria berpengaruh yaitu sig. kurang dari probabilitas 0,05.

Variabel efektifitas (X4) tidak berpengaruh terhadap Pengangguran maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel efektifitas 0,612 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Sedangkan variabel belanja operasi (X5) berpengaruh

terhadap Pengangguran maka hipotesis diterima, karena nilai Sig. Variabel belanja operasi $0,015 < \text{probabilitas } \alpha = 5\% (0,05)$ dimana hasil sama dengan kriteria berpengaruh yaitu sig. kurang dari probabilitas 0,05. Variabel belanja modal (X6) tidak berpengaruh terhadap Pengangguran maka hipotesis diterima, karena nilai Sig. Variabel belanja modal $0,117 > \text{probabilitas } \alpha = 5\% (0,05)$ dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel Pertumbuhan (X7) tidak berpengaruh terhadap Pengangguran maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel Pertumbuhan $0,553 > \text{probabilitas } \alpha = 5\% (0,05)$ dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel ketergantungan (X8) tidak berpengaruh terhadap Pengangguran maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel ketergantungan $0,669 > \text{probabilitas } \alpha = 5\% (0,05)$ dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel derajat desentralisasi (X9) tidak berpengaruh terhadap Pengangguran maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel ketergantungan $0,652 > \text{probabilitas } \alpha =$

$5\% (0,05)$ dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05.

4. Pertumbuhan Ekonomi (Y4)

Variabel kemandirian (X2) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel kemandirian $0,534 > \text{probabilitas } \alpha = 5\% (0,05)$ dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel efisiensi (X3) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel efisiensi $0,557 > \text{probabilitas } \alpha = 5\% (0,05)$ dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel efektifitas (X4) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel efektifitas $0,825 > \text{probabilitas } \alpha = 5\% (0,05)$ dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel belanja operasi (X5) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel belanja operasi $0,253 > \text{probabilitas } \alpha = 5\% (0,05)$ dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05.

Variabel belanja modal (X6) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel belanja modal 0,683 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel Pertumbuhan (X7) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel Pertumbuhan 0,880 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel ketergantungan (X8) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel ketergantungan 0,372 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05. Variabel derajat desentralisasi (X9) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka hipotesis ditolak, karena nilai Sig. Variabel derajat desentralisasi 0,473 > probabilitas $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana kriteria berpengaruh sig. harus kurang dari probabilitas 0,05.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Kinerja Keuangan pemerintah daerah berdasarkan 8 (delapan) indikator menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut membuktikan bahwa upaya pemerintah yang belum optimal dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan prioritas perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal, menyediakan perumahan dengan biaya rendah, melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian.
2. Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan adanya pengaruh terhadap kemiskinan berdasarkan indikator belanja operasi dan belanja modal. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat penduduk dengan pendapatan per kapita kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional masuk dalam kategori miskin
3. Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan adanya pengaruh terhadap pengangguran berdasarkan indikator efisiensi dan belanja operasi. Hal tersebut membuktikan bahwa

pemanfaatan belanja daerah dan belanja operasi harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah

4. Kinerja Keuangan pemerintah daerah menunjukkan adanya pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan indikator derajat desentralisasi. Hal tersebut membuktikan bahwa pendapatan asli daerah digunakan untuk meningkatkan kualitas penduduk wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang berhubungan dengan harapan hidup, intelegktualitas dan standar hidup layak

DAFTAR PUSTAKA

- Berliani, Kartika. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka. *Jurnal Indonesia Membangun*. Vol. 2, No. 1. Mei – Agustus 2016
- Siregar, Helly Aroza. 2016. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal KURS* Vol.1 No. 1, Juni 2016
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2017
<https://www.bps.go.id/publication/2017/07/26/b598fa587f5112432533a656/statistik-indonesia-2017.html>

Saran

Saran dalam penelitian ini:

1. Bagi Pemerintah Daerah
Peningkatan kinerja keuangan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat daerah sehingga perlu optimalisasi dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat
2. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang belum masuk dalam penelitian ini

diakses pada 5 Januari 2019 jam 18.28 WIB

Kompas.com tahun 2017

- Gunawan, Hendra. 2017. Pengangguran di Jateng Hampir 2 Juta, Dede Sudiro Gagasan Program Pemberdayaan Ekonomi.
<http://www.tribunnews.com/regiona/2017/09/20/pengangguran-di-jateng-hampir-2-juta-dede-sudiro-gagas-program-pemberdayaan-ekonomi>. Diakses 10 Januari 2019 jam 10.00 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018
<https://www.google.co.id/search?q=badan+pusat+statistik+jawa+tengah+2018&oq=badan+pusat+statistik+jawa+tengah+2018&aqs=chrome..69i57.14803j0j7&s>

- [ourceid=chrom](#) [e&ie=UTF-8](#).
Diakses pada 5 Januari 2019 jam
19.35 WIB
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 Tentang Pelaporan Keuangan
Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
<http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-8-tahun-2006-tentang-pelaporan-keuangan-dan-kinerja-instansi-pemerintah/PP82006LAKIP.pdf>. Di
akses pada 6 Januari 2019 jam
09.15 WIB.
- Saad, W. dan Kamel Kalakech, 2009. The
Nature of Government Expenditure
and its Impact on Sustainable
Economic Growth. *Middle Eastern
Finance and Economics*. Vol.1,
No. 4. Hal: 39-47
- Susanti, Susy. 2013. Pengaruh Produk
Domestik Regional Bruto,
Pengangguran dan Indeks
Pembangunan Manusia terhadap
Kemiskinan di Jawa Barat dengan
Menggunakan Analisis Data
Panel. *Jurnal Matematika Integratif*.
Vol. 9, No. 1. Hal: 1 – 18
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi analisis
multivariate dengan program
IBM SPSS Semarang: Badan
penerbit Universitas Diponegoro.